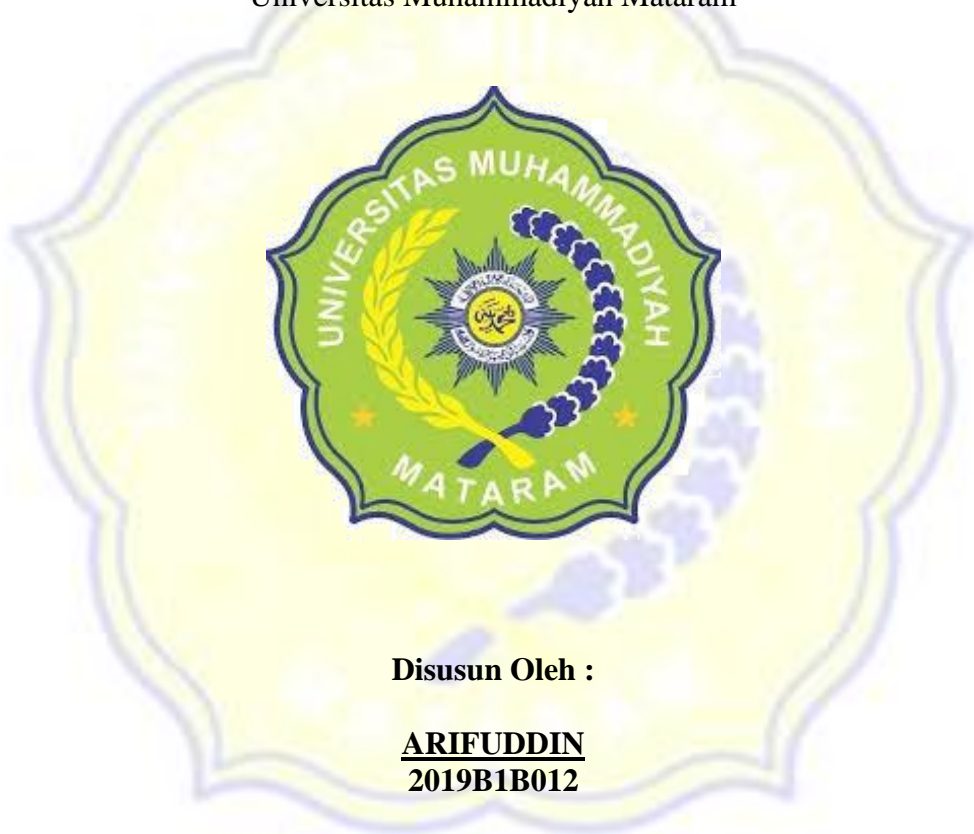


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(PNPM) MANDIRI PERDESESAAN  
DI UPK PNPM KECAMATAN SAPE  
TAHUN 2021**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Strata Satu  
(S1) pada Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**Disusun Oleh :**

**ARIFUDDIN**  
**2019B1B012**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2022/2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**IMPELEMENTASI PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI  
PERDESAAN DI UPK KECAMATAN SAPE TAHUN 2021**

Oleh :

**ARIFUDDIN**

Untuk Memenuhi Ujian Akhir  
Pada tanggal 20 Juni 2023

Menyetujui:

**Pembimbing I**

**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

**Pembimbing II**

**M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP**  
NIDN. 0809039203

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Administrasi Publik**

**Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**  
NIDN : 0822048901

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI PROGRAMNASIONAL**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI**  
**PERDESAAN DI UPK KECAMATAN SAPE TAHUN**

**2021**

Oleh:

**ARIFUDDIN**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 20 Juni 2023  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji:

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN.0806066801

M. Ulfathul Akbar Jafar, S.AP., M.IP  
NIDN.0809039203

Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP  
NIDN.0827118801

Kema

Anggota I

Anggota II

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN.0806066801

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Doktor). Baik di Universitas Muhammadiyah, Maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan dengan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akadenmik, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi lainnya.

Mataram, 31 Juni 2023



**ARIFUDDIN**  
**NIM. 2019B1B012**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIFUDDIN  
 NIM : 2019B1B012  
 Tempat/Tgl Lahir : Maru, 28 Agustus 1999  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Fakultas : FISIPOL  
 No. Hp : 082 145 681 905  
 Email : arifputrasape@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Implementasi program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan di upk kecamatan sape tahun 2021

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.** *50%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 01 Agustus 2023  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ARIFUDDIN  
 NIM. 2019B1B012



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIFUDDIN .....  
NIM : 2019B1B012 .....  
Tempat/Tgl Lahir : NAWA, 28 Agustus 1999 .....  
Program Studi : Administrasi Publik .....  
Fakultas : FISIPOL .....  
No. Hp/Email : 082 145 681 985 .....  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)  
Mandiri Perdesaan di UKP Kecamatan Sape Tahun 2021

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 01 Agustus ..... 2023  
Penulis



ARIFUDDIN  
NIM. 2019B1B012

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. idy  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

*“Barang siapa bertawakal kepada Allah, Niscaya Allah akan mencukupkan  
keperluannya.”*

*(QS. At-Thalaq : 3)*

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

*(Al-Insyirah : 5)*



## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal setiap memulai pekerjaanku. Sembah sujud serta puji dan syukurku pada rahmat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Ayahanda tercinta dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil tanpa lelah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai harapan.
2. Kepada saudaraku yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada keluarga tercinta, terima kasih telah memberikan do'a dan semangat, semoga kita semua menjadi orang berguna.
4. Kepada teman-teman, terima kasih kalian selalu memberikan do'a, dukungan serta motivasi yang tiada hentinya. Terima kasih sudah menerima ku menjadi sahabat.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Publik.
6. Kepada seluruh sahabat satu almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul berjudul "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesesaan Di UPK PNPM Kecamatan Sape Tahun 2021" Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1
5. Bapak M. Ulfatul Akbar Ja'far, S.Ap., M.Ip selaku Dosen Pembimbing 2
6. Seluru Dosen dan Staff Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak dapat penulis saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada kami.
7. Semua pihak yang telah mendukung penyusunan proposal ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 31 Juni 2023

**ARIFUDDIN**  
**NIM. 2019B1B012**

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESESAAN DI UPK PNPM  
KECAMATAN SAPE**

**TAHUN 2021**

**ARIFUDDIN  
2019B1B012**

**ABSTRAK**

Pentingnya peningkatan kualitas masyarakat pada era globalisasi kontemporer semakin meningkat, baik kualitas tersebut terkait dengan ekonomi, kesehatan, maupun keamanan. Namun ternyata masih ada yang hidup dalam kemiskinan dibalik semua ini. kemiskinan yang kebanyakan menimpa individu yang tinggal di daerah pedesaan, seperti mereka yang bergantung pada perikanan, pertanian, dan sumber pendapatan lainnya, jauh dari daerah metropolitan. Sedangkan karena pekerjaan mereka hanya bergantung pada kondisi alam dan pendapatan sehari-hari tidak dapat diprediksi, pendapatan mereka terkadang masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari segi latar belakang dan kualitas pengelola sumber daya manusia (SDM), UPK sangat berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan, keterampilan, dan dedikasi, diperlukan pelatihan. Selain itu, UPK harus dilindungi, diperkuat, dan dilembagakan. UPK Kecamatan Sape juga mengalami keterlambatan dalam pemahaman pengelolaan administrasi dan keuangan. Pemetaan dan evaluasi kesehatan UPK, penyusunan laporan, dan validasi laporan. Selain itu, melakukan restrukturisasi pinjaman, membentuk aliansi dengan pihak lain, dan membuat rencana kerja tetapi masalah diatas dapat teratasi secara perlahan lewat Bimbingan serta keikutsertaan dalam pelatihan yang diadakan oleh UPK Kabupaten Bima. Melalui penjelasan latar belakang sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dimana dituangkan pada bentuk proposal dengan judul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di UPK PNPM Kecamatan Sape”

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan teknik analisis data melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi/penarikan kesimpulan, dan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan di UPK Kec.Sape telah terealisasi secara optimal seperti adanya pelaksanaan simpan pinjam khusus perempuan, keaktifan kelompok perempuan dari seluruh desa di Kecamatan Sape untuk melakukan pinjaman melalui PNPM hingga sekarang; Pinjaman modal dari PNPM tersebut digunakan dan dimanfaatkan sehingga dapat dikelola oleh masyarakat dengan baik seperti untuk modal usaha rumah tangga serta modal koperasi ibu PKK serta pelunasan lancar.

**Kata kunci :** *Implementasi PNPM, Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*

**IMPLEMENTATION OF THE INDEPENDENT RURAL COMMUNITY  
EMPOWERMENT (PNPM) PROGRAM AT UPK PNPM, SAPE DISTRICT  
THE YEAR 2021**

**ARIFUDDIN  
2019B1B012**

**PUBLIC ADMINISTRATION STUDY PROGRAM  
FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE  
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF MATARAM**

**ABSTRACT**

*The importance of improving communities' quality in the contemporary era of globalization has increased, whether related to economics, health, or security. Nonetheless, poverty persists, particularly among rural residents who rely on fisheries, agriculture, and other non-metropolitan sources of income. Their livelihoods depend on natural conditions, and their daily income is unpredictable, making it sometimes inadequate to meet the requirements of their families. The PNPM Unit of Sape Sub-district (UPK Kecamatan Sape) has a variety of disciplines and levels of human resource management. Their knowledge, abilities, and commitment must be met through training. In addition, UPKs must be institutionalized, strengthened, and protected. Sape Sub-district's UPK also faces difficulties in understanding administrative and financial management, undertaking health mapping and evaluating UPK, preparing and validating reports, restructuring loans, forming alliances with other parties, and developing work plans. However, these issues can be addressed progressively through guidance and participation in training organized by the PNPM Unit of Bima District. The background information sparked the author's interest in conducting scientific research, which is presented in the form of a proposal titled "Implementation of the National Program for Community Empowerment (PNPM) Mandiri Perdesaan in the PNPM Unit of Sape Subdistrict." The research method used in this study is descriptive qualitative research. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, while data analysis techniques involve data collection, data reduction, data presentation, verification/conclusion drawing, and data validity. The research findings show that implementing the PNPM Mandiri Perdesaan Program in the PNPM Unit of Sape Sub-district has been optimally realized. The special women's savings and loan program has been successfully implemented, and women's groups from all villages in Sape Sub-district actively borrow through PNPM until now. The*

**MENGESAHKAN**

**SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10

2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Teori Kebijakan.....	12
2.2.2 Teori Implementasi .....	13
2.2.3 PNPM Mandiri .....	19
2.2.3.1 Pengertian PNPM Mandiri.....	19
2.2.3.2 Jenis dan Tujuan PNPM Mandiri.....	22
2.2.3.3 Visi dan Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri .....	23
2.2.3.4 Prinsip PNPM Mandiri.....	24
2.2.3.5 Jenis Kegiatan PNPM Mandiri.....	25
2.2.3.6 Strategi PNPM Mandiri .....	25
2.2.3.7 Sasaran dan Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan (Satker 2011)	26
2.3 Kerangka Berfikir.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Metode Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Sumber Data.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Tinjauan Historis /Sejarah Pendirian UPK Kec. Sape .....	35
4.2 Sejarah Kepengurusan UPK Kecamatan Sape.....	38
4.3 Latar Belakang UPK Kecamatan Sape .....	39

4.4 Perkembangan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Kec. Sape.....	42
4.5 Struktur Organisasi .....	44
4.6 Pembahasan.....	45
4.6.1 Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan UPK Kecamatan Sape.....	45
4.6.2 Dampak Pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan pada UPK Kecamatan Sape ....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 4.1 Siklus Dana Bergulir .....	42
Tabel 4.2 Siklus Pinjaman Sikompak .....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	44





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.....	55
Lampiran 2. Berita Acara.....	56
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	59



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pentingnya peningkatan kualitas masyarakat pada era globalisasi kontemporer semakin meningkat, baik kualitas tersebut terkait dengan ekonomi, kesehatan, maupun keamanan. Namun ternyata masih ada yang hidup dalam kemiskinan dibalik semua ini. kemiskinan yang kebanyakan menimpa individu yang tinggal di daerah pedesaan, seperti mereka yang bergantung pada perikanan, pertanian, dan sumber pendapatan lainnya, jauh dari daerah metropolitan. Sedangkan karena pekerjaan mereka hanya bergantung pada kondisi alam dan pendapatan sehari-hari tidak dapat diprediksi, pendapatan mereka terkadang masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pertimbangan harus diberikan pada jenis fasilitas tertentu yang dapat meningkatkan keterlibatan dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat untuk mendorong partisipasi yang bermanfaat bagi semua pihak terkait (Sukarjo, 2006 : 2).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (untuk selanjutnya disingkat PNPM) Hal ini diberlakukan sejak tahun 2007 merupakan contoh nyata dari strategi pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran serta menjalankan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1993, yang berkaitan dengan upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang meliputi PNPM Mandiri untuk Daerah Khusus dan Desa Tertinggal,

PNPM Mandiri untuk Perkotaan, dan PNPM Mandiri Perdesaan. Sebuah program bernama PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk mendorong pengentasan kemiskinan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Program PNPM Mandiri bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan tidak hanya dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi dan bantuan modal usaha, tetapi juga dengan melibatkan masyarakat dan aparatur dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis baik untuk perencanaan maupun pelaksanaannya. sebagai pelestarian hasil pembangunan. Dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian di unit pengelola keuangan (untuk selanjutnya disingkat UPK) Amanah Kecamatan Sape. (<http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com.content&task=view&id=502&Itemid=119>).

Keyakinan yang ditanamkan pada program dan warga Sape, Kabupaten Bima, adalah hal yang selalu dijunjung oleh UPK Sape, seperti kata "AMANAHA". Keberhasilan UPK Amanah dalam mengelola perputaran dana simpan pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), khususnya dana SPP (Simpan Pinjam Untuk Perempuan), tergantung pada kemampuan pengurus untuk bekerja secara kohesif, transparan, dan tentunya menjaga kepercayaan.

Kesuksesan UPK Sape tahun 2014 semakin menuai pujian dengan berulang kali menyabet predikat Unit Pengelola Keuangan (UPK) terbaik, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dan sebagai salah satu calon UPK terbaik di tingkat nasional. Pada Oktober 2014, UPK Sape mengumumkan laba sebesar Rp 1,7 miliar.

UPK Amanah tidak lagi harus mengeluarkan biaya sewa kantor minimal Rp 14 juta per tahun karena uang yang diterima dan peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Sape.

Pada tahun ini UPK Sape telah melakukan pencairan dana perguliran yang ke 17 sebesar RP 4 milyar dan pada perguliran ke 18 telah ditetapkan oleh Tim Pendanaan dan sedang dicairkan sebesar Rp.4.520.000; milyar kepada 122 kelompok atau 1.529 anggota kelompok pemanfaat dana bergulir. UPK Amanah, Sape melayani 18 Desa, yaitu : Sari, Tanah Putih, Boke, Jia, Parangina, Rai Oi, Na'e, Naru Barat, Naru, Bugis, Oi Maci, Rasa Bou, Sangia, Kowo, Buncu, Lamere, Poja dan Bajo Pulo. Luasnya cakupan wilayah yang dilayani, belum lagi untuk desa pemekaran yang tidak lagi berada di Sape, tetapi masyarakatnya masih dilayani, mau tidak mau membuat UPK Amanah bekerja ekstra keras agar semua terlayani dengan baik. Bila sebelumnya pengelolaan dana hanya ditangani oleh tiga orang pengurus harian saja, UPK Amanah kemudian menambah tenaga kasir dan juru tagih. Untuk mendukung mobilitas tenaga juru tagih, UPK Amanah telah menambah inventaris berupa sepeda motor vixion. Dengan motor ini, Anthoni, sang juru tagih, berhasil mengumpulkan rata-rata Rp 200 juta setiap bulan, bahkan setoran dari kelompok bermasalah yang sudah menunggak beberapa tahun.

Salah satu tugas dan tanggung jawab secara umum, agar keberlangsungan UPK terus terjaga, adalah melakukan pelatihan dan peningkatan unsur-unsur kelembagaan, administrasi, permodalan, keuangan, pinjaman, dan pertumbuhan usaha kelompok peminjam. Berdasarkan laporan Bulan September 2014, UPK Amanah Sape menunjukkan data perkembangan kelompok sebanyak 246 kelompok

SPP dengan jumlah anggota 1.212, berkembang menjadi 975 kelompok dengan jumlah anggota menjadi 8.933 anggota.

Pembinaan kelompok ini menjadi sangat penting artinya, agar terjadi hubungan yang baik antara UPK dengan kelompok. Keberlangsungan kelompok juga berarti keberlangsungan kehidupan UPK, karena walaupun memberikan pinjaman kepada ribuan orang, UPK bukanlah lembaga keuangan yang diperbolehkan menerima simpanan dari masyarakat umum. Secara managerial, UPK hanya bertahan pada kemampuannya menggulirkan dana perolehan modal dari PNPM MPd, terutama selepas pendampingan program dan tidak adanya tambahan modal. Hal inilah yang menjadi dasar sehingga UPK Amanah, Sape, menggunakan motto: “Melalui PNPM MPd, kita lestarikan dana bergulir dengan membina dan menumbuh-kembangkan kelompok SPP”.

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawab UPK Sape sebagaimana mandat yang diberikan Forum MAD (Musyawarah Antar Desa) melalui BKAD, UPK Sape menyusun dan merencanakan kebijakan umum dalam pelaksanaan dan pelestarian perguliran, selalu mengacu kepada konsep perguliran PNPM MPd. Sehingga UPK Sape telah meningkatkan pertumbuhan modal perguliran, Berdasarkan Data laporan UPK pada Bulan September 2014, pertumbuhan modal usaha UPK Amanah, dari Rp 3.301.350.000 menjadi Rp.7.028.324.423, atau berkembang lebih dari dua kali lipatnya.

Mekanisme pengelolaan dana bergulir dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akses dana bergulir sedikit agak berbeda dengan akses dana Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM) yang lebih banyak digunakan untuk kegiatan infrastruktur atau pelatihan masyarakat. Perbedaan ini didasari antara lain karena sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan, kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dan UPK, dan kebutuhan kelompok sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh program.

Kondisi yang kompetitif ini juga membawa dampak yang berbeda dalam hal perlakuan terhadap kelompok, tentu saja bukan dalam arti yang negative. Bagi kelompok yang lancar pengembaliannya, UPK memberikan insentif berupa potongan pembayaran di akhir cicilan, yang dikenal dengan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu). UPK Amanah telah memberikan IPTW sebesar Rp 12 juta untuk 31 kelompok peminjam. Jumlah yang cukup menggiurkan ini, juga memberikan motivasi bagi kelompok lain untuk melakukan pengembalian tepat waktu, sesuai atau bahkan lebih cepat dari perjanjian pinjaman yang telah disepakati sebelumnya.

Pengelolaan surplus operasional tahunan UPK, setelah dikurangi resiko pinjaman dan operasional, sebanyak 15% dana tersebut digunakan untuk dana social bagi orang miskin. Tahun 2013 UPK Amanah, Sape telah menyalurkan dana social kepada orang miskin sebesar Rp 111 juta, sedangkan untuk tahun 2014 telah dicairkan bantuan sebesar Rp 41 juta, yang diberikan dalam bentuk bingkisan sembako terhadap 15 keluarga miskin di Sape. Memang, tidak perlu menjadi kaya untuk berderma, juga tidak perlu menjadi perusahaan raksasa untuk mengeluarkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*). Ikatan emosional sebagai bagian dari

masyarakat dan rasa tanggung jawab untuk memberi yang terbaik, menjadi dorongan yang kuat untuk berbuat lebih. UPK Amanah Sape telah membuktikan itu. Melalui pengelolaan yang baik, dana yang terbatas ini akan terus bergulir dan membawa manfaat dan keberkahan bagi lebih banyak orang. Ibu-ibu mendapatkan tambahan modal untuk usahanya, dan dengan jasa pinjamannya itu, masyarakat miskin pun menerima manfaatnya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang saat ini sedang gencar dilaksanakan di berbagai daerah yang merasa membutuhkan bantuan ini adalah kelembagaan, administrasi, permodalan, keuangan, pinjaman, dan pertumbuhan usaha kelompok peminjam, merupakan salah satu program-program yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Orang-orang dari eselon sosial ekonomi rendah, seperti buruh, nelayan, petani, dan orang miskin di kota dan desa, perlu diberi pengaruh yang lebih besar. PNPM-Mandiri Perdesaan adalah program pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui pinjaman modal, pembinaan kelompok, dan pembinaan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan menekankan pada proyek infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir untuk kelompok perempuan, dan inisiatif kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Inisiatif pemberdayaan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas. Komponen

terpenting dalam upaya membangun dan mengembangkan kawasan adalah penyediaan infrastruktur. Lingkungan sosial ekonomi yang sehat memberi masyarakat kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi pada penyediaan infrastruktur di lingkungan mereka, yang dapat mendorong kegiatan sosial ekonomi.

Murbeng, Soeaidy, Riyanto (2013). Menurut temuan penelitian, mereka yang mendapat bantuan program PNPM MP mengatakan bahwa masyarakat desa telah sepenuhnya mengadopsinya dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pelestarian. Tujuan akhirnya yakni memberdayakan lingkungan sekitar untuk mencapai swasembada dan terus mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk bergerak menuju kualitas hidup yang lebih tinggi.

Adapun beberapa masalah yang sering terjadi kurangnya koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri di UPK Kabupaten Sape, terutama dalam hal mengantisipasi munculnya permasalahan di tingkat kecamatan agar dapat direalisasikan. terdeteksi lebih cepat solusi dan kurangnya memahami tupoksi dan fungsi masing-masing dalam hal ini berpengaruh dalam peningkatan kapasitas UPK. Mengingat pentingnya UPK, manajemen yang efektif diperlukan agar UPK tetap berjalan lancar. Perencanaan, pengorganisasian, akuntansi, dan pemantauan adalah beberapa di antaranya.

Dari segi latar belakang dan kualitas pengelola sumber daya manusia (SDM), UPK sangat berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan, keterampilan, dan dedikasi, diperlukan pelatihan. Selain itu, UPK harus dilindungi,



diperkuat, dan dilembagakan. UPK Kecamatan Sape juga mengalami keterlambatan dalam pemahaman pengelolaan administrasi dan keuangan. Pemetaan dan evaluasi kesehatan UPK, penyusunan laporan, dan validasi laporan. Selain itu, melakukan restrukturisasi pinjaman, membentuk aliansi dengan pihak lain, dan membuat rencana kerja tetapi masalah diatas dapat teratasi secara perlahan lewat Bimbingan serta keikutsertaan dalam pelatihan yang diadakan oleh UPK Kabupaten Bima.

Melalui penjelasan latar belakang sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dimana dituangkan pada bentuk proposal dengan judul ***“Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di UPK PNPM Kecamatan Sape”***

### **1.2 Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang, sehingga perumusan masalah penelitian yakni:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan UPK Kecamatan Sape ?
2. Apa dampak pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan pada UPK Kecamatan Sape?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Melalui latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Agar memahami pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di UPK Kecamatan Sape.
2. Agar memahami dampak pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat mandiri pedesaandi UPK Kecamatan Sape.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Untuk memahami peran dan partisipasi yang dapat mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa mandiri dan pemberdayaan masyarakat miskin, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan informasi baru yang praktis dan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### **a. Manfaat bagi pemerintah**

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada pemerintah daerah, dan diyakini akan memberikan saran kepada pemerintah desa tentang PNPM Mandiri Perdesaan.

###### **b. Manfaat bagi masyarakat**

Jadi narasumber pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui PNPM MP dalam pembangunan perdesaan.

###### **c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya**

Menjadi sumber pengetahuan atau data untuk kajian lanjutan tentang PNPM Mandiri Perdesaan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan referensi dari berbagai penelitian terdahulu untuk melakukan penelitian guna memajukan teori yang digunakan untuk menyelidiki penelitian yang akan dilakukan. Penulis tidak menemukan kesejajaran dengan judul penelitian sebelumnya, seperti judul penelitian penulis, berdasarkan judul penelitian terdahulu. Namun demikian, penulis telah mengangkat beberapa kajian terdahulu untuk memperluas atau menambah referensi bahan kajian dalam penelitian. Studi penulis akan didukung oleh referensi dari sejumlah publikasi penelitian sebelumnya, termasuk penelitian sebelumnya.

**Tabel 2.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Rina Anjarwati, (2011)	Implementasi pemberian kredit PNPM-MP Dalam meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah di Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Tahun 2009	Langkah-langkah pemberian kredit PNPM-MP meliputi pengajuan permohonan uang pinjaman disertai dengan nama masing-masing anggota, sifat usahanya, jumlah yang dipinjam, dan lampiran fotokopi masing-masing anggota yang masih dalam keadaan baik.
2	Diah Yuliana, (2016)	Analisi faktor- faktor yang mempengaruhi kredit macet dana bergulir di PNPM Mandiri perdesaan kecamatan Guntur kabupaten Demak	Kapasitas untuk mengelola kredit memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kredit macet, yang menunjukkan bahwa jika klien dapat mengelola kredit secara

			efektif, kemungkinan berkembangnya kredit macet minimal.
3	Herawati, (2017)	Kredit Bermasalah dan Langkah penyelesaiannya pada dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tarai )	Faktor penyebab pinjaman bermasalah dalam pendanaan SPP awal: Perusahaan tidak berhasil karena variabel dari konsumen yang disebabkan oleh ketidakkonsistenan penggunaan keuangan dengan strategi semula, kedua : faktor dari PNPM-MP yakni : Rendahnya pengawasan PNPM-MP terhadap perusahaan klien, tidak adanya penjaminan PNPM-MP dan konsekuensi apabila nasabah gagal melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.

**Tabel 2.2**

**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Rina Anjarwati, (2011)	Penelitian ini sama membahas tentang implementasi pada program PNPM	Penelitian dijalankan ditempat berbeda
2	Diah Yuliana, (2016)	Jenis penelitian ini yakni sama sama memakai pendekatan kualitatif	Penelitian ini membahas tentang produk yang terdapat pada PNPM serta ditinjau dari segi Ekonomi islam
3	Herawati, (2017)	Jenis penelitian ini yakni kualitatif	Perbedaanya terletak pada obyek penelitian

## **2.2 Landasan Teori**

Harapan masyarakat tidak terpenuhi oleh rencana dan program pembangunan yang direncanakan pemerintah ketika dilaksanakan. Kami tidak dapat membiarkan kegagalan penerapan ini terus berlanjut. Berbagai variabel, baik internal maupun eksternal pelaku kebijakan, berkontribusi terhadap kegagalan implementasi kebijakan. Kajian ini berfokus pada tiga perhatian utama kebijakan publik untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik di Indonesia, yaitu; teknik penelitian implementasi kebijakan, teori-teori yang dapat menjelaskan implementasi kebijakan, dan topik kajian implementasi kebijakan (dalam penelitian ini difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yaitu PNPM Mandiri Perdesaan). Penelitian ini menggali berbagai teori terkait, antara lain teori kebijakan, teori implementasi, dan teori PNPM Mandiri Perdesaan, dalam upaya memahami fenomena implementasi PNPM Mandiri Perdesaan.

### **2.2.1 Teori Kebijakan**

Suatu sistem pemerintahan harus mencakup pernyataan kebijakan publik yang mencerminkan tujuan pemerintah itu sendiri di samping mesin birokrasi dan lembaga publik. Kebijakan harus mempertimbangkan baik fenomena sosial masyarakat yang tinggal di lingkungan itu maupun tujuan pemerintah. Menurut Thomas R. Bye (Winarno, 1982:2) Apa pun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dianggap sebagai kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Dalam menyusun kebijakan yang akan dikeluarkan, ketiga lembaga tersebut harus bekerja sama

sebagai satu kesatuan.

Ketiga lembaga tersebut harus berfungsi sebagai satu kesatuan, menurut Wahab (1997: 4), yang menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan yang saling berhubungan yang dibuat oleh seorang aktor politik mengenai tujuan yang dipilih dan sarana untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan tersebut diambil. masih dalam batas kewenangan aktor yang dikeluarkan. Dari sekian banyak definisi kebijakan publik yang telah dibahas di atas, terlihat bahwa para aktor politik membuat sejumlah keputusan berdasarkan fenomena sosial yang terjadi terkait dengan tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Pemahaman bahwa suatu kebijakan yang diarahkan pada kepentingan rakyat diperlukan untuk mewujudkannya maka penting untuk memahami posisi strategis dan fungsi pemerintah sebagai aktor publik dalam kaitannya dengan kebijakan publik. Salah satu cara untuk memahami Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) yang merupakan hasil kebijakan publik yang berhubungan langsung dengan keadaan lingkungan dan implementasi kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan mempelajari implementasi kebijakan.

### **2.2.2 Teori Implementasi**

Implementasi adalah ungkapan umum yang dapat berarti implementasi atau aplikasi. Rai Artini, Nyoman Djinar Setiawina, dan Ketut Djayastra (2015) dan Browne mengusulkan “perluasan tindakan yang beradaptasi satu sama lain disebut sebagai implementasi”

Implementasi, menurut Syaukani et al (2004: 295), adalah urutan tindakan yang diambil untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dan sampai ke tangan orang yang dapat menggunakannya untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Urutan tugas terdiri dari:, *Pertama* penciptaan satu set tambahan peraturan yang menafsirkan kebijakan. *Kedua*, menyiapkan sumber daya, seperti bangunan dan infrastruktur, sumber daya keuangan, dan, tentu saja, memutuskan siapa yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan, untuk mendorong kegiatan implementasi. *Ketiga*, bagaimana mengkomunikasikan kebijakan secara efektif kepada masyarakat.

Menurut perspektif ini, dipahami bahwa proses implementasi kebijakan sebenarnya melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung memengaruhi perilaku semua pihak. Jaringan ini mencakup badan-badan administratif yang bertanggung jawab menjalankan program dan menanamkan kepatuhan pada kelompok sasaran. terlibat dalam menetapkan pedoman sehingga tindakan pemerintah akan menghasilkan realisasi tujuan kebijakan publik.

Sementara itu, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan arti penting implementasi tersebut dalam Wahab (2005:65) dengan menyatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan sah atau dirumuskan merupakan fokus perhatian pada implementasi kebijakan. Secara khusus, mereka mencatat bahwa peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah pengesahan pedoman kebijakan negara mencakup upaya administrasi dan upaya untuk memberikan dampak nyata pada masyarakat.

Menurut Surmayadi (2005:79), proses implementasi terdiri dari tiga komponen utama: (1) adanya program atau kebijakan aktif (2) Kelompok sasaran, atau populasi yang dipilih untuk mendapatkan manfaat dari program, perbaikan, atau perubahan. (3) komponen pelaksana (Implementors), dapat berupa perusahaan atau orang, yang bertugas memastikan pelaksanaan dan mengawasi proses pelaksanaan.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Implementasi Beberapa kebijakan yang bersifat lugas, seperti kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, hanya melibatkan satu instansi yang berfungsi sebagai pelaksana. Di sisi lain, upaya implementasi kebijakan makro, seperti yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan, akan melibatkan berbagai organisasi, termasuk pemerintah kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa.

Berbagai aspek atau variabel yang masing-masing saling terkait akan mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Ada berbagai teori implementasi yang memperdalam pemahaman kita tentang berbagai faktor yang terlibat dalam implementasi:

1. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Merilee S. Grindle (Wibawa, 2005), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi. Kedua faktor tersebut harus didukung oleh



program aksi dan proyek individu yang dirancang dan dibiayai sesuai dengan tujuan kebijakan, sehingga pelaksanaan kegiatan akan berdampak pada masyarakat, orang, dan kelompok secara keseluruhan. Menurut Grindle, variabel isi kebijakan mengandung berbagai indikator, diantaranya:

- a. Isi kebijakan mencerminkan kepentingan kelompok sasaran atau kelompok khalayak sasaran.
- b. Manfaat yang dapat diakses oleh kelompok sasaran
- c. Cakupan perubahan kebijakan yang diantisipasi.
- d. Tempat Pengambil keputusan tertuang dalam isi kebijakan.
- e. Tingkat perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan.
- f. Lokasi pengambilan keputusan.

tiga indikator berikut adalah di antara variabel lingkungan kebijakan:

- a. Sejauh mana para pemain yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan mengontrol kekuatan, kepentingan, dan taktik.
- b. Ciri-ciri lembaga dan pemerintah yang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan tanggapan kelompok sasaran.

Kebijakan yang melibatkan berbagai kepentingan akan lebih menantang untuk dieksekusi dalam situasi ini daripada kebijakan yang hanya melibatkan beberapa kepentingan. Oleh karena itu, sejauh mana berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran, dan sebagainya) terlibat aktif dalam implementasi kebijakan akan menentukan berhasil atau tidaknya upaya tersebut.

## 2. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn, terdapat 6 variabel dimana memengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Standar dan tujuan untuk kebijakan. Untuk mencapainya, kriteria dan tujuan kebijakan harus tepat dan terukur.
- b. Sumber daya. Sumber daya manusia dan non-manusia diperlukan untuk membantu pelaksanaan kebijakan.
- c. Koneksi antar organisasi. Dalam banyak inisiatif, bantuan dan kerjasama dengan lembaga lain diperlukan untuk pelaksanaan program.
- d. karakteristik pelaksana. Struktur birokrasi, konvensi, dan pola interaksi yang ada di dalam birokrasi itulah yang dimaksud dengan karakteristik lembaga pelaksana dan semuanya akan berdampak pada bagaimana suatu program dilaksanakan.
- e. keadaan politik, sosial, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya keuangan dan lingkungan yang dapat membantu penerapan kebijakan secara efektif. Disposisi implementor ini terdiri dari tiga komponen penting, yaitu reaksi implementor terhadap kebijakan dan kesiapannya untuk mempraktekkan kebijakan tersebut. dan tingkat keparahan disposisi pelaksana, yaitu preferensi nilai pelaksana.

## 3. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Menurut Weimer dan Vining (2007: 396), ada tiga kategori utama dari faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seberapa sukses suatu program diimplementasikan: logika kebijakan, pengaturan di mana program itu

diimplementasikan, dan bakat pelaksana.

- a. alasan suatu kebijakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diberlakukan masuk akal dan sehat secara teoritis.
- b. Keberhasilan mengeksekusi kebijakan akan tergantung pada pengaturan di mana ia digunakan. Konteks sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan fisik atau geografis di mana setiap kebijakan yang diterapkan masuk akal dan sehat secara teoritis semuanya termasuk dalam definisi istilah "lingkungan" ini.
- c. Kemampuan implementor. Kompetensi dan kemampuan pelaksana kebijakan dapat berdampak pada efektivitas suatu kebijakan.

4. Teori George C. Edward III (Nawawi, 2009:138)

Efektivitas implementasi mungkin tergantung pada sejumlah faktor, termasuk:

a. *Communication* (Komunikasi)

Penyampaian informasi kepada komunikan disebut sebagai komunikasi. Selain itu, untuk meminimalkan kesalahan dalam implementasi kebijakan, kelompok sasaran harus diberi tahu tentang maksud dan tujuan kebijakan. Ada beberapa segi dalam komunikasi kebijakan, seperti transformasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

b. *Resources* (Sumber Daya)

Sumber daya yakni Sekalipun isi kebijakan telah disampaikan secara jelas dan konsisten, jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk

melaksanakan kebijakan tidak akan berhasil. Ini merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

c. *Disposition* (Disposisi)

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

d. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Badan yang paling sering terlibat dalam keseluruhan pelaksanaan kebijakan adalah struktur birokrasi. Penataan administrasi yang bertugas menjalankan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana kebijakan tersebut dijalankan.

Dari beberapa teori diatas peneliti akan menggunakan satu teori yang akan menunjang penelitian ini yakni teori George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) penggunaan teori implementasi kebijakan ini tentunya berdasar pada keserasian dan kecocokan asumsi yang mendasari dari konsep sesuai judul yang diangkat oleh peneliti. Model proses implementasi kebijakan dari George C. Edward III Menawarkan suatu kerangka kerja yang jelas guna memahami keterkaitan atau hubungan di antara unsur-unsur implementasi kebijakan.

### **2.2.3 PNPM Mandiri**

#### **2.2.2.1 Pengertian PNPM Mandiri**

Salah satu inisiatif pemerintah untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan adalah PNPM Mandiri. Tujuan utama PNPM Mandiri adalah untuk mengurangi kemiskinan melalui inisiatif yang mempromosikan keterlibatan

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri merupakan perpaduan dan perluasan dari program-program berbasis lingkungan yang ada saat ini untuk memerangi kemiskinan, (Depdagri, 2008).

Gambaran Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (2011) tentang PNPM Mandiri Perdesaan Program bernama Mandiri Perdesaan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan Mandiri merupakan prakarsa nasional yang berbentuk kerangka kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan inisiatif berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.

Salah satu program nasional Pemerintah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat kelembagaan masyarakat lokal, dan mendorong berkembangnya kinerja pemerintahan yang efektif dalam jangka panjang. -tujuan jangka pendek pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kebijakan publik digunakan untuk melaksanakan program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Selain tata kelola yang hanya berurusan dengan mesin negara, kebijakan adalah alat pemerintah yang juga berkaitan dengan administrasi sumber daya publik. “Sedangkan kebijakan sosial adalah jenis kebijakan publik yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial”

Bridgeman dan Davis mengklaim bahwa kebijakan publik setidaknya

memiliki tiga aspek yang saling berhubungan, diantaranya:

1. Kebijakan sebagai tujuan.

Kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan atau alat untuk mencapai tujuan.

2. Kebijakan sebagai pilihan atau tindakan yang legal

Karena dibuat oleh badan yang sah dalam sistem pemerintahan, maka keputusan kebijakan tersebut bersifat legal atau otoritatif.

3. Kebijakan sebagai hipotesis

Atas dasar teori, model, atau asumsi sebab-akibat, kebijakan dikembangkan.

Efektivitas pemberdayaan sebagai suatu proses seringkali ditentukan oleh definisi pemberdayaan sebagai tujuan. Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) adalah kesepakatan dunia untuk mencapai tujuan pembangunan bersama, termasuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan. PNPM Mandiri merupakan program nasional berupa kerangka kebijakan sebagai landasan dan acuan pelaksanaan MDG; membangun kemitraan global untuk pembangunan; memastikan kelestarian lingkungan; memastikan pendidikan dasar untuk semua orang; mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian bayi; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi penyakit menular dan lainnya; dan meningkatkan kesehatan ibu.

PNPM Mandiri mendorong prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan dengan menyelaraskan dan mengembangkan sistem, proses dan prosedur program, pemberian bantuan, dan

pemberian stimulus pembiayaan.

### **2.2.3.2 Jenis dan Tujuan PNPM Mandiri**

Pemerintah Indonesia mengembangkan Program Nasional Mandiri Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang memiliki tiga kategori berbeda:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan
3. PNPM Mandiri wilayah kusus dan Desa Tertinggal.

Tujuan keseluruhan PNPM Mandiri adalah untuk meningkatkan otonomi pengambilan keputusan dan mendukung pembangunan pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin di pedesaan.

Namun, tujuan sebenarnya dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah:

1. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan administrasi suatu pembangunan, terutama di kalangan masyarakat miskin, kelompok perempuan, masyarakat adat, dan kelompok lain yang terkadang kurang beruntung;
2. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan memungkinkan sumber daya pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
3. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan memungkinkan sumber daya pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
4. untuk memperkuat kemampuan organisasi peduli lokal untuk membantu yang kurang mampu di masyarakat mereka sementara juga meningkatkan

- pemberdayaan masyarakat dan kemandirian;
5. Meningkatkan kreativitas dan pemanfaatan teknologi mutakhir untuk informasi dan komunikasi untuk memberdayakan masyarakat;
  6. Meningkatkan modal sosial masyarakat untuk memungkinkan pengembangan prospektif dan pelestarian pengetahuan budaya daerah;
  7. Agar pengentasan kemiskinan lebih berhasil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok lain harus diperkuat.

#### **2.2.3.3 Visi dan Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri**

Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat kurang mampu di pedesaan merupakan komponen kunci dari misi PNPM Mandiri. Dimana Kesejahteraan adalah kepuasan dari kebutuhan fundamental masyarakat. Kemandirian melibatkan kemampuan untuk mengelola sumber daya untuk mengatasi kesulitan yang terkait dengan kemiskinan dan mengatur diri sendiri untuk mendistribusikan sumber daya di lingkungan mereka.

Sedangkan misi PNPM Mandiri

- a. Meningkatkan kelembagaan dan kemampuan masyarakat.
- b. Pelembagaan mekanisme untuk pembangunan inklusif.
- c. Meningkatkan peran dan operasi pemerintah daerah.
- d. Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas infrastruktur dasar di lingkungan sekitar.
- e. Penciptaan jaringan kemitraan yang berkelanjutan.

#### **2.2.3.4 Prinsip PNPM Mandiri**

- a. Perhatikan pertumbuhan manusia. Masyarakat menyukai inisiatif yang secara langsung mendukung upaya pembangunan.



b. Otonomi Masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.

c. Desentralisasi

Memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

d. Berorientasi pada masyarakat miskin

Segala keputusan yang diambil dan disepakati berpihak kepada masyarakat miskin.

e. Partisipasi

Masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan proses, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran dana, waktu maupun ruang.

f. Kestaraan dan keadilan gender

Memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berperan aktif dalam setiap pembangunan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

g. Demokratis

Masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat. Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal

maupun administratif.

h. Prioritas

Masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

- i. Keberlanjutan dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestarian.

### **2.2.3.5 Jenis Kegiatan PNPM Mandiri**

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM.
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal).
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal), Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

### **2.2.3.6 Strategi PNPM Mandiri**

PNPM Mandiri dalam menjalankan kegiatannya mempunyai beberapa strategi (Depdagri, 2008), yaitu:

- a. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengambil keputusan.
- b. Meningkatkan sinergis antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam Penanggulangan kemiskinan.

- c. Memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana bantuan langsung masyarakat (BLM/*block grant*) dan bantuan pendampingan berupa *technical assistance*.

#### **2.2.3.7 Sasaran dan Pendanaan PNPM Mandiri Pedesaan (Satker 2011)**

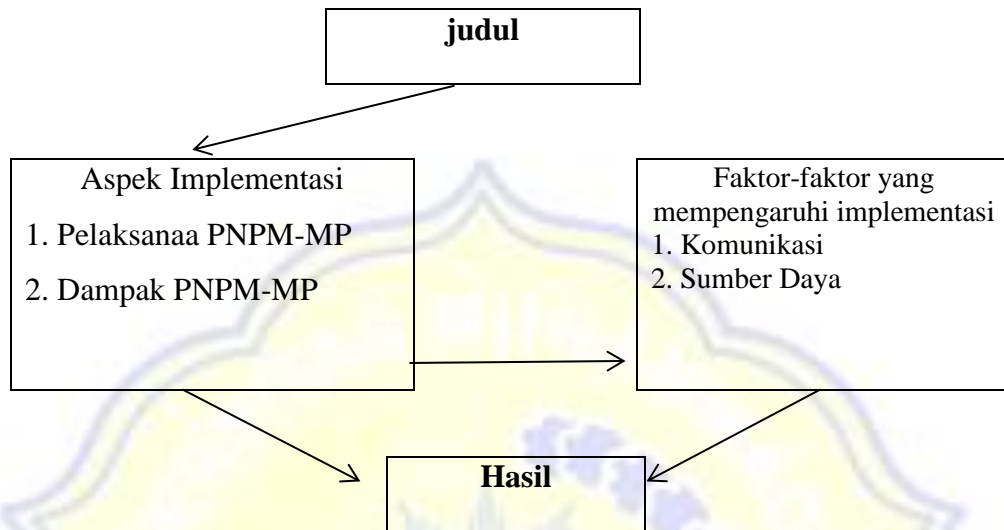
Sasaran PNPM Mandiri Pedesaan terbagi menjadi yaitu lokasi sarana dan kelompok sarana. Lokasi sarana PNPM Mandiri yaitu meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan ketegori kecamatan bermasah dalam PPK/PNPM Mandiri pedesaan. Sedangkan kelompok sarana meliputi masyarakat miskin di pedesaan, kelembagaan masyarakat diperdesaan, dan kelembagaan pemerintahan lokal. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program Pemerintah Pusat dan Daerah yang direncanakan, dilaksanakan, dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah pusat dan Daerah.

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir bertujuan untuk memudahkan kegiatan ataupun perencanaan penelitian didalam melakukan penelitian. Begitu juga kerangka pemikiran terkait seluruh kegiatan penelitian sejak dari perencanaan penelitian, pelaksanaan, sampai dengan penyelesaian penelitian menjadi satu kesatuan yang utuh.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan mempunyai suatu dampak terhadap desa tersebut. Adapun Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir Penelitian**



Keterangan :

Program PNPM Mandiri adalah salah satu program dari pemerintah yang salah satu tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini adalah program bantuan dana bergulir untuk penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat di Kecamatan Sape. Dengan adanya program PNPM Mandiri Pedesaan, maka akan membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka, sehingga masalah kemiskinan akan dapat berkurang.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus) dan bersifat deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan/atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. (Sukidin dan Basrowi, 2002)

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedurnya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. (Wahyuni, 2013)

Sedangkan sifat penelitiannya adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian lapangan yang berusaha untuk mengungkapkan

gejala suatu objek tertentu dengan kata-kata sekaligus untuk mengembangkan atau mendeskripsikan fenomena tertentu sesuai apa adanya yang ditemukan di lapangan.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di kantor UPK Kecamatan Sape.

### **3.3 Sumber Data**

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan. Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan

pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Jadi penulis datang ke tempat penelitian untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada perusahaan tersebut untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang di lihat dan sesuai dengan kenyataannya.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian. Tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data maka peneliti diharapkan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Satori dan Komariah, 2009). Dalam setiap proses pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam pengumpulan data tentang peluang dan tantangan perbankan syariah dalam menghadapi era digital maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di UPK Kecamatan Sape. Teknik wawancara ini digunakan untuk

mengetahui secara mendalam, mendetail dan intensif adalah upaya menemukan pengalaman-pengalaman informan atau responden dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. Pewawancara harus memiliki konsep yang jelas mengenai hal yang di butuhkan, yakni pendoman wawancara yang nantinya sangat dibutuhkan sekali dalam melakukan penelitian disaat wawancara, sebab semua pertanyaan sudah disiapkan. Sehingga, dalam melakukan penelitian jadi lebih mudah lagi. Langkah-langkah yang akan digunakan peneliti yaitu:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan dengan tujuan menentukan individu yang berkompeten dalam persoalan yang diangkat.
- b. Mengadakan persiapan wawancara dengan menetapkan waktu dan tempat yang memadai agar wawancara dapat dilaksanakan dengan maksimal.
- c. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, seperti ikhtisar penelitian secara umum dan informasi dasar atau latar belakang orang yang diajak wawancara.
- d. Melaksanakan wawancara dengan cara mengawali dan membuka alur wawancara sebagai orang netral dengan tidak masuk pada suatu konflik pendapat.
- e. Melaksanakan dan mengatur alur wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
- f. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dengan menekankan informasi-informasi penting atau bagian-bagian komentar penting dan mengakhirinya.
- g. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan dalam rangka



pengecekan keabsahan data.

- h. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh dengan cara mengorganisasi dan mensistematiskan data untuk dianalisa.

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yakni Bapak Moh Syafi'i, A.md selaku Kepala UPK Kecamatan Sape.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Dokumentasi diperoleh dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.(arikunto 2005). Tujuan dari penggunaan metode ini yaitu untuk memperoleh data yang kongkret mengenai Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di UPK Kecamatan Sape.

## 3. Observasi

Secara mudah Observasi sering disebut metode pengamatan, Metode Observasi ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan dan pengamatan langsung terhadap objek tertentu di lapangan. dalam observasi nampaknya hanya sekedar “mengamati” namun kegiatan mengamati ini tidak boleh dipandang main-main oleh peneliti.

Penggambaran yang tepat dan cermat, pencatatan pengamatan, maupun pengolahan pengamatan yang jelas bukan suatu pekerjaan yang sepele. Orang akan selalu mempertanyakan apakah suatu pengamatan itu cukup sah dan apakah obyek yang diamati itu representatif (cukup mewakili) dengan gejala

yang diamati, pekerjaan observasi adalah pekerjaan yang memerlukan ketekunan dan kesungguhan. (Soeranto dan Arsyad, 2003)

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pengamatan untuk mengetahui Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sangia Kecamatan Sape serta mencatat segala hal yang perhubungan dengan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di UPK Kecamatan Sape.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang disusun. Pemberian interpretasi ini dapat berupa keterangan ataupun menarik kesimpulan terhadap data yang telah disusun. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tanpa perhitungan statistik. Tujuan akhir penelitian adalah memberikan kesimpulan melalui studi literatur atau riset kepustakaan yang peneliti lakukan.

Adapun Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, mengacu pada pendapat (Miles dan Huberman, 2014) yang membagi proses tahap ini dalam tiga komponen pokok, yaitu:

Reduksi data (*data reduction*) dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan data dari catatan, kemudian membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

Sajian data (*data display*) adalah data yang telah terkumpul disusun dengan

narikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), dengan memahami arti dari berbagai hal yang ditemui, pola-pola, pernyataan-pernyataan, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan-kesimpulan sementara, yang diverifikasi selama penelitian berlangsung.

